

Hurriyah dan Istiqlal: Rekonstruksi Makna Kemerdekaan dalam Tafsir Nusantara sebagai Basis Pendidikan Karakter Bangsa

^{*1} Nur Aini Setyaningtyas, ² Abid Nurhuda, ³ Ahmad Hadi Pranoto

¹ Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

² Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta, Indonesia

³ Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, Indonesia

Corresponding Email: nurainityas123@gmail.com

Abstrak:

Kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamasikan lebih dari delapan dekade silam ternyata menyisakan paradoks: bangsa ini merdeka secara politik, namun kerap masih terjajah secara karakter. Penelitian ini bertolak dari keresahan tersebut untuk merekonstruksi makna kemerdekaan melalui dua konsep kunci dalam Al-Qur'an, yaitu hurriyah (kebebasan individu yang bertanggung jawab) dan istiqlal (kemandirian kolektif suatu bangsa), sebagaimana dipahami dalam tradisi tafsir Nusantara. Menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan tafsir maudhu'i dan analisis isi, penelitian ini menelaah karya-karya tafsir seperti Al-Azhar, Al-Mishbah, Al Huda dan Tarjuman Al-Mustafid untuk menemukan benang merah antara kedua konsep tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hurriyah dan istiqlal bukan dua wacana terpisah, melainkan dua denyut yang saling melengkapi: kebebasan batin individu menjadi prasyarat bagi lahirnya kemandirian kolektif, sementara kedaulatan bangsa hanya tegak di atas fondasi warga yang telah merdeka secara moral. Temuan ini direlevansikan dengan lima nilai utama Penguatan Pendidikan Karakter (religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas) yang ternyata dapat ditelusuri akar teologisnya dalam kerangka hurriyah-istiqlal. Kontribusi artikel ini adalah menawarkan kerangka konseptual yang menjembatani tafsir klasik dengan kebijakan pendidikan karakter kontemporer. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendidikan karakter bangsa akan lebih berakar dan bermakna apabila digali kembali dari mata air tafsir Nusantara, bukan sekadar dirumuskan dari kerangka filosofis kebangsaan semata.

Kata Kunci: Hurriyah; Istiqlal; Tafsir Nusantara; Kemerdekaan; Pendidikan Karakter

TRANSCIVILIA: Journal of Multidisciplinary Knowledge and Civilization

Vol 1 Issue 4 2026

Received: 14/08/2026 Revised: 15/08/2026 Accepted: 16/08/2026 Online: 17/08/2026

© 2026 The Authors. Published by TRANSCIVILIA. This is an open-access article under the CC BY-SA license (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

Pendahuluan

Kemerdekaan sering diperingati sebagai peristiwa yang telah selesai, seolah cukup dirayakan setiap tahun dengan upacara dan pengibaran bendera, padahal secara epistemologis ia adalah medan makna yang tidak pernah berhenti diperebutkan. Bangsa Indonesia telah delapan dekade lebih menyandang status merdeka secara politik-yuridis, namun paradoks justru muncul ketika kemerdekaan lahiriah itu berjalan beriringan dengan gejala keterjajahan batin: krisis keteladanan, mudarnya kejujuran publik, dan menguatnya kecenderungan masyarakat untuk bebas tanpa arah moral. Realitas inilah yang mendorong perlunya pembacaan ulang terhadap konsep kemerdekaan, bukan sekadar sebagai warisan sejarah kolonial, melainkan sebagai kategori teologis-etis yang berakar pada Al-Qur'an. Di titik inilah dua kosakata Arab, hurriyah dan istiqlal, menemukan relevansinya sebagai pintu masuk untuk menggali kembali hakikat merdeka yang

genuine, yang tidak berhenti pada aspek teritorial-politik semata, melainkan menyentuh dimensi kejiwaan dan karakter manusia Indonesia.

Secara leksikal, hurriyah dan istiqlal kerap dianggap sinonim padahal keduanya menyimpan nuansa makna yang berbeda dan saling melengkapi. Hurriyah berakar dari kata al-hurr, lawan dari al-'abd (budak), yang oleh Ibn 'Asyur dalam Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyah dimaknai dalam dua tingkatan: pertama sebagai antitesis perbudakan, dan kedua secara metaforis sebagai kapasitas seseorang untuk mengurus dirinya sendiri tanpa tekanan dari pihak mana pun (Ibn 'Ashur, 2006). Sementara itu, istiqlal lebih menekankan dimensi kemandirian dan berdiri sendiri sebagai suatu kolektivitas atau bangsa, sehingga hari kemerdekaan dalam tradisi Arab disebut 'Id al-Istiqlal (Umar, 2021). Distingsi ini penting sebab hurriyah berbicara pada level individu-spiritual, sedangkan istiqlal berbicara pada level sosial-kenegaraan; dan pertemuan keduanya justru menjadi fondasi bagi pembentukan karakter bangsa yang merdeka secara utuh, baik jiwa maupun struktur.

Wacana kemerdekaan dalam bingkai hurriyah-istiqlal tersebut tidak dapat dilepaskan dari cara umat Islam Nusantara membaca dan menafsirkan Al-Qur'an sesuai dengan konteks sosio-historisnya sendiri. Kajian tafsir Nusantara, sebagaimana ditegaskan Lukman (2021), bukan sekadar perpanjangan tangan pasif dari tradisi tafsir Timur Tengah, melainkan sebuah genealogi penafsiran yang memiliki lokalitas, karakter, dan pergulatan wacana tersendiri. Karya-karya seperti Tafsir al-Azhar karya Hamka, Al-Mishbah karya Quraish Shihab, hingga Marah Labid karya Syekh Nawawi al-Bantani menunjukkan bagaimana ulama Nusantara meramu pesan universal Al-Qur'an dengan pengalaman kolektif bangsa terjajah (Saifuddin & Wardani, 2017; Gusmian, 2015). Lokalitas penafsiran ini menjadikan tafsir Nusantara sebagai ruang hermeneutis yang khas untuk memaknai kemerdekaan, sebab ulama-ulama tersebut tidak menafsir dalam ruang hampa, melainkan dalam pergumulan langsung dengan penjajahan, perjuangan kemerdekaan, dan pembangunan bangsa pascakolonial (Zaiyadi, 2018).

Signifikansi tafsir Nusantara semakin terasa ketika dikaitkan dengan persoalan pendidikan karakter bangsa yang hingga kini masih menjadi agenda besar dunia pendidikan Indonesia. Beberapa kajian terdahulu telah menunjukkan keterkaitan erat antara penafsiran Al-Qur'an dan pembentukan nilai karakter, misalnya penelitian Mawangir (2018) yang menggali nilai-nilai pendidikan karakter dalam Tafsir Al-Mishbah, atau kajian Maya et al. (2024) yang mengangkat urgensi tafsir tematik pendidikan karakter sebagai rujukan pembelajaran tafsir tarbawi di perguruan tinggi. Demikian pula Chaniago (2022) menegaskan bahwa Al-Qur'an dan hadis menyimpan formulasi karakter yang komprehensif, mencakup relasi manusia dengan Tuhan, dirinya sendiri, sesama, dan bangsanya. Namun demikian, kajian-kajian tersebut umumnya masih berhenti pada eksplorasi nilai karakter secara umum, belum secara spesifik menautkannya dengan konsep kemerdekaan dalam bingkai hurriyah dan istiqlal sebagaimana hidup dalam tradisi tafsir Nusantara.

Dari pemetaan tersebut tampak sebuah celah akademik yang cukup mendasar. Di satu sisi, studi tafsir Nusantara berkembang pesat namun lebih banyak berkutat pada persoalan metodologi, historiografi, dan lokalitas bahasa (Lukman, 2021; Maarif, 2021); di sisi lain, studi pendidikan karakter berbasis Al-Qur'an cenderung mengambil tema-tema etik yang umum seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keteladanan, tanpa menariknya pada isu kebangsaan dan kemerdekaan secara eksplisit. Padahal, tema kemerdekaan (dengan segala keragaman makna hurriyah dan istiqlal di dalamnya) memiliki potensi besar untuk dijadikan basis nilai pendidikan karakter yang kontekstual dengan jati diri keindonesiaan, sekaligus menjadi jembatan antara semangat religiusitas dan semangat kebangsaan yang selama ini kerap dipertentangkan secara keliru.

Bertolak dari kesenjangan tersebut, artikel ini dimaksudkan untuk merekonstruksi makna kemerdekaan melalui pembacaan kritis atas konsep hurriyah dan istiqlal dalam khazanah tafsir Nusantara, serta menegaskan relevansinya sebagai basis pendidikan karakter bangsa di tengah tantangan zaman yang kian kompleks. Kajian ini penting bukan hanya untuk memperkaya diskursus akademik dalam bidang ilmu Al-Qur'an dan tafsir, melainkan juga untuk menawarkan

alternatif rujukan bagi perumusan kebijakan pendidikan karakter yang berakar pada nilai keislaman sekaligus keindonesiaan. Dengan demikian, kemerdekaan tidak lagi dimaknai sebagai peristiwa historis yang selesai pada 17 Agustus 1945, melainkan sebagai proyek etis yang terus-menerus harus dihidupkan dalam jiwa setiap generasi bangsa.

Metode Penelitian

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*), mengingat objek kajiannya adalah teks-teks tafsir dan bukan fenomena lapangan yang menuntut pengumpulan data empiris-observasional. Pilihan desain ini didasarkan pada pertimbangan bahwa rekonstruksi makna hurriyah dan istiqlal hanya dapat ditelusuri secara memadai melalui pembacaan mendalam atas naskah tafsir itu sendiri, sebagaimana ditegaskan Zed (2008) bahwa riset kepustakaan menuntut peneliti berhadapan langsung dengan sumber tertulis sebagai data primer, bukan sekadar bahan pendukung di belakang meja. Pendekatan yang digunakan bersifat deskriptif-analitis dengan corak hermeneutis, yakni berupaya memahami makna kemerdekaan bukan hanya dari apa yang tersurat dalam teks tafsir, melainkan juga dari konteks sosio-historis kelahiran tafsir tersebut, sehingga posisi mufasir Nusantara sebagai penafsir yang bergumul dengan realitas kolonial dan pascakolonial dapat terbaca secara utuh, sejalan dengan cara pandang genealogis yang ditawarkan Lukman (2021) dalam membaca tradisi tafsir Indonesia.

Sumber data penelitian ini terbagi menjadi dua kategori. Data primer diperoleh dari kitab-kitab tafsir Nusantara yang memuat penafsiran ayat-ayat bertema kebebasan dan kemerdekaan, antara lain Tafsir Al-Azhar karya Hamka, Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab, Tafsir Al Huda karya Bakri Syahid serta Tarjuman Al-Mustafid karya 'Abd Al-Ra'uf Singkel, yang dipilih karena representasi keragaman zaman, latar keilmuan, dan corak kebahasaan tafsir Nusantara (Saifuddin & Wardani, 2017). Data sekunder dihimpun dari artikel jurnal, buku, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema kemerdekaan, pendidikan karakter, dan historiografi tafsir Indonesia, guna memperkaya sekaligus menguji silang temuan dari data primer. Untuk menjangkau dan mengorganisasi ayat-ayat serta penafsiran yang berkaitan dengan tema hurriyah dan istiqlal secara sistematis, penelitian ini menempuh langkah-langkah metode tafsir maudhu'i sebagaimana dirumuskan al-Farmawi (1977), yakni menghimpun seluruh ayat setema, menyusunnya berdasarkan kronologi turun dan konteks munasabah, kemudian menganalisisnya secara terpadu untuk menemukan benang merah konseptual yang utuh.

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (*content analysis*) yang dipadukan dengan model analisis interaktif, mencakup tahap kondensasi data, penyajian data, dan penarikan simpulan yang berlangsung secara siklikal hingga diperoleh pemahaman yang jenuh dan konsisten (Miles et al., 2014). Krippendorff (2018) menegaskan bahwa analisis isi memungkinkan peneliti menafsirkan makna di balik teks secara sistematis dan replikabel, sehingga kecenderungan bias subjektif peneliti dapat diminimalkan melalui prosedur pengkodean tema yang konsisten antarsumber. Guna menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan penafsiran satu mufasir dengan mufasir lainnya serta mengonfirmasinya dengan kajian-kajian akademik tentang pendidikan karakter berbasis Al-Qur'an, sehingga rekonstruksi makna kemerdekaan yang dihasilkan tidak berdiri sendiri sebagai tafsir subjektif peneliti, melainkan terverifikasi secara intersubjektif dalam dialog dengan tradisi keilmuan tafsir dan pendidikan Islam yang telah mapan.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Hurriyah dalam Al-Qur'an

Pembacaan atas ayat-ayat yang bertema kebebasan dalam Al-Qur'an menampakkan sebuah pola yang konsisten, yakni kebebasan tidak pernah dihadirkan sebagai kondisi yang berdiri sendiri, melainkan senantiasa berpasangan dengan konsekuensi tanggung jawab. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian pendahuluan, Ibn 'Ashur memaknai al-hurriyah dalam dua lapis, yaitu sebagai lawan dari perbudakan dan sebagai kapasitas mengatur diri tanpa tekanan pihak lain (Ibn 'Ashur, 2006). Kedua lapis makna ini, bila dibawa ke ranah tafsir, sesungguhnya membentuk satu kesatuan gagasan tentang manusia merdeka: manusia yang bebas dari penghambaan kepada sesama makhluk, namun sekaligus terikat pada penghambaan tunggal kepada Allah, sehingga kebebasannya tidak pernah liar tanpa arah.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa tafsir Nusantara secara konsisten menegaskan pola relasional antara kebebasan dan tanggung jawab tersebut, bukan memisahkannya. Kajian atas pemikiran Hamka dalam Tafsir Al-Azhar, misalnya, memperlihatkan bahwa kehendak bebas manusia untuk memilih dan bertindak selalu dibingkai dengan beban tanggung jawab atas pilihan itu sendiri, sehingga kebebasan berekspresi (termasuk dalam konteks kontemporer seperti ruang digital) tidak dapat dilepaskan dari koridor moral dan syariat (Hanif, 2023). Pandangan ini menegaskan bahwa dalam nalar tafsir Nusantara, hurriyah bukanlah konsep yang diimpor mentah-mentah dari wacana kebebasan sekuler Barat, melainkan konsep yang telah mengalami penjernihan teologis sejak dari akar penafsirannya.

Dimensi lain dari hurriyah yang menonjol dalam tafsir Nusantara adalah kebebasan beragama, sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Baqarah [2]: 256 tentang tiadanya paksaan dalam urusan agama. Studi komparatif atas penafsiran Hamka dan Quraish Shihab terhadap ayat ini menunjukkan titik temu yang menarik: keduanya sepakat bahwa Islam melarang segala bentuk pemaksaan keyakinan, namun kebebasan tersebut tidak lantas dimaknai sebagai kebebasan mutlak untuk berpindah-pindah keyakinan tanpa pertimbangan apa pun (Kuswanto & Alfi, 2023). Artinya, kebebasan beragama dalam tafsir Nusantara dipahami sebagai penghormatan atas pilihan batin seseorang, bukan sebagai relativisme yang menafikan kebenaran objektif suatu keyakinan.

Pola pemaknaan semacam ini memperlihatkan bahwa ulama Nusantara tidak menafsirkan hurriyah dalam ruang hampa ideologis, melainkan dalam pergumulan dengan realitas masyarakat majemuk Indonesia yang sejak awal berdiri di atas fondasi keragaman suku, agama, dan golongan. Kebebasan beragama yang dimaknai secara moderat yakni mengakui pilihan pribadi tanpa membuka pintu relativisme total yang mana pada dasarnya adalah jawaban atas kebutuhan riil bangsa yang plural untuk hidup berdampingan tanpa kehilangan pegangan keimanan masing-masing. Di sinilah tafsir Nusantara menunjukkan kecerdasan kontekstualnya, meramu pesan universal Al-Qur'an dengan kebutuhan lokal keindonesiaan.

Dari sisi individu, hurriyah juga tampil dalam wajah kebebasan berpikir dan berkehendak yang menjadi prasyarat bagi manusia untuk disebut sebagai makhluk bermartabat. Tanpa kebebasan berkehendak, konsep pahala dan dosa, taat dan maksiat, menjadi kehilangan maknanya, sebab keduanya mengandaikan adanya pilihan yang benar-benar berasal dari diri manusia sendiri. Penafsiran Hamka atas ayat-ayat yang berkaitan dengan kehendak manusia menegaskan bahwa Allah memberi ruang ikhtiar kepada hamba-Nya, sekalipun ruang tersebut tetap berada dalam bingkai ketentuan-Nya yang lebih besar (Hanif, 2023). Kebebasan semacam ini disebut kebebasan yang bertanggung jawab, bukan kebebasan yang lepas kendali.

Dengan demikian, rekonstruksi makna hurriyah dari tafsir Nusantara menghasilkan satu simpulan awal yang penting bagi kerangka penelitian ini: kemerdekaan pada level individu bukanlah kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang lahir dari kesadaran akan tanggung jawab moral dan teologis. Prinsip inilah yang kelak akan menjadi salah satu pijakan utama dalam

merumuskan pendidikan karakter, sebab pendidikan karakter pada hakikatnya juga berusaha menanamkan kebebasan yang bertanggung jawab kepada peserta didik, bukan sekadar kepatuhan buta ataupun kebebasan tanpa arah.

Konsep Istiqlal dalam Al-Qur'an

Jika hurriyah berbicara pada level kebebasan individu, maka istiqlal menemukan gemanya pada level yang lebih luas, yakni kemandirian dan kedaulatan sebuah bangsa. Sebagaimana disinggung dalam pendahuluan, kata istiqlal dalam tradisi Arab dipakai secara khusus untuk merujuk pada hari kemerdekaan suatu bangsa, *'Id al-Istiqlal* (Umar, 2021), yang menunjukkan bahwa akar kata ini sejak semula sarat dengan muatan kolektif-kenegaraan, berbeda dengan hurriyah yang lebih personal. Perbedaan muatan semantis ini penting untuk ditegaskan agar rekonstruksi makna kemerdekaan tidak jatuh pada penyederhanaan yang mencampuradukkan dua wilayah makna yang sesungguhnya saling melengkapi namun tidak identik.

Salah satu ayat kunci yang oleh para pengkaji tafsir kerap dikaitkan dengan gagasan kemandirian kolektif adalah QS. Ar-Ra'd [13]: 11, yang menegaskan bahwa Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga kaum itu sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka. Kajian atas penafsiran klasik hingga kontemporer terhadap ayat ini menunjukkan adanya pergeseran penekanan: penafsiran klasik lebih menyoroti dimensi teologis tentang penjagaan malaikat dan ketetapan Allah, sementara penafsiran kontemporer cenderung menarik pesan sosial-etis bahwa perubahan nasib suatu bangsa niscaya dimulai dari perubahan internal masyarakatnya sendiri (Rahman & Erdiyansyah, 2024). Pergeseran penekanan ini justru memperkaya, bukan mempertentangkan, karena keduanya bertemu pada satu titik: kemandirian sebuah bangsa adalah buah dari kesungguhan usaha kolektif, bukan sekadar takdir yang jatuh dari langit.

Istiqlal dalam pengertian kolektif ini pada gilirannya berkelindan erat dengan konsep martabat manusia (karamah insaniyah) yang banyak ditegaskan dalam tafsir Nusantara. Kajian atas Tafsir Al-Azhar memperlihatkan bahwa Hamka memandang ayat-ayat seperti QS. Al-Isra' [17]: 70 dan QS. Al-Hujurat [49]: 13 sebagai penegasan bahwa manusia (apa pun suku, ras, atau statusnya) memiliki kemuliaan eksistensial yang bersumber dari penciptaan ilahi itu sendiri, sehingga martabat tersebut mesti diaktualisasikan melalui tanggung jawab moral dan sosial, bukan sekadar diklaim secara pasif (Kurniawan & Pulungan, 2026). Prinsip kesetaraan martabat ini menjadi fondasi bagi bangsa yang hendak berdiri mandiri, sebab bangsa yang berdaulat mustahil dibangun di atas struktur sosial yang masih menempatkan sebagian warganya sebagai makhluk kelas dua.

Aspek lain yang relevan dengan istiqlal adalah bagaimana Al-Qur'an menata etika sosial sebagai prasyarat kemandirian kolektif, misalnya larangan merendahkan sesama sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Hujurat [49]: 11. Kajian tematik atas ayat ini menunjukkan bahwa larangan mengolok-olok, mencela dengan panggilan buruk, dan berprasangka buruk terhadap sesama bukan sekadar etika interpersonal, melainkan fondasi bagi terciptanya kohesi sosial yang menjadi prasyarat kekuatan kolektif sebuah bangsa (Bakri & Faza, 2025). Bangsa yang warganya gemar saling merendahkan satu sama lain akan sulit mencapai kemandirian sejati, sebab energi kolektifnya habis untuk konflik internal, bukan untuk pembangunan bersama.

Menariknya, sosok mufasir Nusantara sendiri kerap menjadi teladan hidup dari perpaduan antara semangat keagamaan dan semangat kebangsaan yang menjadi inti dari istiqlal. Hamka, sebagai contoh paling menonjol, dipandang sebagai figur yang menyatukan peran ulama dan negarawan sekaligus, di mana agama dihayati sebagai ruh perjuangan dan landasan untuk mengisi kemerdekaan, sementara negara dipandang sebagai wadah untuk menegakkan kebebasan beragama dan beribadah (Faozi, 2021). Keteladanan semacam ini menunjukkan bahwa dalam nalar tafsir Nusantara, agama dan kebangsaan tidak pernah diposisikan sebagai dua kutub yang saling meniadakan, melainkan dua sisi mata uang yang saling menopang demi tegaknya kemandirian bangsa.

Berdasarkan pemetaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa istiqlal dalam tafsir Nusantara memiliki tiga pilar utama: pertama, kesadaran bahwa kemandirian kolektif lahir dari usaha sungguh-sungguh, bukan sekadar nasib; kedua, pengakuan atas kesetaraan martabat seluruh warga bangsa tanpa memandang latar belakang; dan ketiga, keteladanan tokoh yang mampu memadukan spiritualitas dan kebangsaan secara utuh. Ketiga pilar ini menjadi jembatan penting menuju pembahasan berikutnya tentang bagaimana hurriyah dan istiqlal saling menopang dalam satu bangunan makna kemerdekaan yang utuh.

Dialektika Hurriyah dan Istiqlal dalam Tafsir Nusantara

Setelah memetakan hurriyah dan istiqlal secara terpisah, langkah analisis berikutnya adalah menelusuri bagaimana kedua konsep tersebut berdialektika dalam satu bangunan penafsiran yang utuh. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa tafsir Nusantara tidak pernah memperlakukan kebebasan individu dan kemandirian bangsa sebagai dua ranah yang terpisah, melainkan sebagai dua lingkaran konsentris yang saling mengandaikan. Kebebasan individu yang bertanggung jawab, sebagaimana dibahas pada bahasan awal, adalah prasyarat bagi lahirnya warga bangsa yang matang secara moral, sementara kemandirian kolektif sebagaimana dibahas pada bahasan berikutnya hanya mungkin ditegakkan oleh individu-individu yang telah mengalami kemerdekaan batin terlebih dahulu.

Relasi dialektis ini tampak jelas pada karya-karya tafsir Nusantara yang lahir dari pergulatan langsung dengan pengalaman kolonial, sebagaimana Tafsir Al-Mishbah karya Quraish Shihab dan Tarjuman Al-Mustafid karya 'Abd Al-Ra'uf Singkel yang keduanya menunjukkan bagaimana isu-isu sosial kontekstual (termasuk relasi kuasa dan kesetaraan) senantiasa dibaca ulang dalam terang ayat-ayat Al-Qur'an sesuai kebutuhan zaman masing-masing (Saifuddin & Wardani, 2017). Karya-karya semacam ini menegaskan bahwa penafsiran bukan sekadar aktivitas tekstual yang steril dari konteks, melainkan medan pergulatan hidup antara teks suci dan pengalaman nyata suatu bangsa yang tengah mencari jalan menuju kemerdekaan.

Genealogi historis tafsir Nusantara turut memperkuat argumen ini. Sebagaimana ditegaskan dalam kajian historiografis, tafsir yang lahir di bumi Nusantara bukanlah sekadar salinan pasif dari tafsir Timur Tengah, melainkan tradisi genealogis tersendiri yang tumbuh dari jejaring dialogis panjang antara satu karya dan karya lainnya, sekaligus dari pergumulan dengan realitas sosial-politik lokal (Lukman, 2021). Dalam kerangka genealogis inilah hurriyah dan istiqlal tidak hadir sebagai konsep abstrak yang diwariskan begitu saja, melainkan sebagai konsep yang terus-menerus diuji dan direkonstruksi setiap kali mufassis Nusantara berhadapan dengan tantangan zamannya, mulai dari penjajahan hingga tantangan modernitas.

Dinamika sejarah tafsir di Indonesia menunjukkan pula bahwa proses ini berlangsung lintas generasi ulama, dari masa penjajahan hingga pascakemerdekaan, sehingga tema-tema kebebasan dan kemandirian senantiasa mendapatkan pembacaan baru sesuai konteks kebangsaan yang dihadapi (Gusmian, 2015). Pembacaan yang terus diperbarui ini memperlihatkan bahwa dialektika hurriyah-istiqlal bukanlah rumusan final yang selesai pada satu titik sejarah, melainkan proyek hermeneutis yang hidup dan terus bergerak seiring perubahan zaman, sehingga relevansinya tidak pernah kedaluwarsa bagi generasi mana pun.

Titik temu paling nyata antara hurriyah dan istiqlal dapat dilihat pada bagaimana ulama Nusantara memandang hubungan agama dan negara sebagai satu kesatuan yang saling menghidupi. Agama menjadi sumber kebebasan batin yang membebaskan manusia dari penghambaan kepada sesama makhluk, sementara negara menjadi instrumen kolektif yang melindungi ruang bagi kebebasan batin tersebut untuk diekspresikan secara aman dan bermartabat (Faozi, 2021). Relasi simbiotik ini menjadi kunci untuk memahami mengapa perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak pernah bisa dilepaskan dari peran ulama dan santri, sebab bagi mereka, membebaskan bangsa dari

penjajahan adalah kelanjutan logis dari membebaskan jiwa manusia dari penghambaan yang tidak semestinya.

Sintesis dari dialektika ini menegaskan sebuah proposisi penting bagi penelitian ini: kemerdekaan sejati, dalam bingkai tafsir Nusantara, adalah pertemuan antara jiwa yang merdeka secara batin (*hurriyah*) dan bangsa yang berdaulat secara kolektif (*istiqlal*). Kedua dimensi ini tidak dapat dipertukarkan atau direduksi satu terhadap yang lain, sebab bangsa yang berdaulat secara politik namun rakyatnya masih terjajah secara batin (oleh hawa nafsu, ketidakjujuran, atau kehilangan arah moral) pada hakikatnya belum benar-benar merdeka. Proposisi inilah yang akan menjadi jembatan konseptual menuju pembahasan mengenai kekhasan lokalitas tafsir Nusantara pada bahasan berikutnya.

Kekhasan Lokalitas Tafsir Nusantara dalam Memaknai Kemerdekaan

Salah satu kontribusi paling khas dari tafsir Nusantara terhadap wacana kemerdekaan adalah kemampuannya menghadirkan pesan universal Al-Qur'an dalam idiom, bahasa, dan pengalaman kolektif yang akrab dengan masyarakat lokal. Kekhasan lokalitas ini ditegaskan oleh para pengkaji historiografi tafsir yang menyebutkan bahwa istilah tafsir Nusantara merujuk pada kegiatan penafsiran yang menggunakan simbol, bahasa, dan dialek lokal, sehingga pesan-pesan besar seperti kemerdekaan dapat lebih mudah dicerna dan dihayati oleh masyarakat akar rumput, bukan hanya oleh kalangan elite terpelajar (Zaiyadi, 2018).

Kekhasan ini terlihat jelas pada ragam bahasa yang digunakan dalam tafsir Nusantara, mulai dari bahasa Arab-Melayu dalam Tarjuman Al-Mustafid, bahasa Indonesia dalam Tafsir Al-Azhar dan Al-Mishbah, hingga bahasa daerah seperti Jawa dalam Tafsir Al-Huda karya Bakri Syahid (Saifuddin & Wardani, 2017). Keragaman bahasa ini bukan sekadar persoalan teknis penerjemahan, melainkan strategi kultural untuk menanamkan nilai-nilai kemerdekaan langsung ke akar budaya masyarakat, sehingga semangat *hurriyah* dan *istiqlal* tidak berhenti sebagai wacana elite, melainkan menjadi denyut nadi kesadaran kolektif rakyat di berbagai pelosok Nusantara.

Kasus Tafsir Al-Huda karya Bakri Syahid menjadi contoh menarik tentang bagaimana penafsiran lokal dapat sarat muatan politik kebangsaan. Kajian atas karya ini menunjukkan bahwa Bakri Syahid, sebagai seorang kolonel sekaligus mufasir, menyisipkan pembacaan yang bernuansa nasionalisme Jawa ke dalam penafsirannya, mencerminkan bagaimana identitas kedaerahan dan semangat kebangsaan dapat berjaln erat dalam satu karya tafsir tanpa harus saling meniadakan (Maarif, 2021). Fenomena ini membuktikan bahwa lokalitas bukan ancaman bagi keutuhan kebangsaan, melainkan justru salah satu jalan bagi pesan kemerdekaan untuk berakar kuat di hati masyarakat yang beragam latar budayanya.

Kekhasan lokalitas tafsir Nusantara juga tampak dari cara para mufasirnya memosisikan diri sebagai bagian dari pergerakan kebangsaan, bukan sekadar pengamat dari menara gading akademik. Hamka, misalnya, dikenal luas sebagai ulama yang juga aktif sebagai pejuang kemerdekaan dan tokoh pergerakan, sehingga penafsirannya terhadap ayat-ayat kebebasan dan kemandirian tidak lahir dari perenungan teoretis semata, melainkan dari pengalaman batin seorang pejuang yang merasakan langsung pahitnya penjajahan (Faozi, 2021). Posisi eksistensial semacam ini memberi bobot otentisitas tersendiri pada penafsiran yang dihasilkan, sebab pesan kemerdekaan yang disampaikan bukan sekadar teori, melainkan kesaksian hidup.

Genealogi tafsir Nusantara yang terus berkembang dari generasi ke generasi juga menunjukkan bahwa lokalitas ini bersifat dinamis, bukan statis. Karya-karya tafsir Nusantara dari periode awal abad ke-17 seperti Tarjuman Al-Mustafid hingga karya-karya kontemporer terus menunjukkan negosiasi kreatif antara pesan universal Al-Qur'an dan konteks lokal yang terus berubah, termasuk dalam merespons isu-isu kebangsaan pascakolonial (Lukman, 2021). Dinamika ini menegaskan bahwa rekonstruksi makna kemerdekaan bukanlah proyek satu generasi,

melainkan estafet penafsiran lintas zaman yang terus disesuaikan dengan tantangan kebangsaan yang dihadapi masing-masing era.

Dari kekhasan lokalitas ini, penelitian ini menyimpulkan bahwa kekuatan utama tafsir Nusantara dalam mewacanakan kemerdekaan terletak pada kemampuannya menjembatani pesan universal dengan akar budaya lokal tanpa kehilangan kedalaman spiritualnya. Kekhasan inilah yang menjadikan tafsir Nusantara sebagai sumber daya yang sangat potensial bagi pendidikan karakter bangsa, sebab nilai-nilai yang digali darinya sudah teruji kesesuaiannya dengan alam pikir dan budaya masyarakat Indonesia, bukan nilai impor yang masih harus melalui proses adaptasi panjang.

Dari Kemerdekaan Politik menuju Kemerdekaan Karakter

Bagian ini beranjak pada inti argumen penelitian, yaitu upaya merekonstruksi makna kemerdekaan dari sekadar peristiwa politik-yuridis menuju proyek pembentukan karakter yang berkelanjutan. Berdasarkan pada penjelasan sebelumnya bahwa dalam nalar tafsir Nusantara, kemerdekaan sejak awal telah dipahami secara berlapis: ada kemerdekaan lahiriah dari penjajahan asing, namun ada pula kemerdekaan batiniah dari belenggu hawa nafsu, kebodohan, dan kezaliman terhadap diri sendiri maupun sesama. Pergeseran fokus dari kemerdekaan lahiriah menuju kemerdekaan batiniah inilah yang menjadi inti dari rekonstruksi makna yang diusulkan penelitian ini.

Kajian atas nilai-nilai pendidikan karakter dalam Tafsir Al-Mishbah menunjukkan bahwa Quraish Shihab secara konsisten menautkan pesan-pesan Al-Qur'an dengan pembentukan akhlak dan kepribadian, sehingga tafsir tidak berhenti pada penjelasan makna literal ayat, melainkan diarahkan pada internalisasi nilai dalam kehidupan nyata pembacanya (Mawangir, 2018). Pendekatan semacam ini secara implisit menegaskan bahwa kemerdekaan sejati seorang muslim adalah ketika ia mampu menundukkan hawa nafsunya dan menghayati nilai-nilai luhur Al-Qur'an dalam keseharian, bukan sekadar merdeka secara status kewarganegaraan semata.

Upaya menjembatani tafsir tematik dengan pendidikan karakter juga tercermin dalam pengembangan buku ajar Tafsir Tarbawi yang secara eksplisit disusun sebagai tafsir tematik pendidikan karakter untuk digunakan di perguruan tinggi keagamaan (Maya et al., 2024). Kehadiran buku semacam ini menjadi bukti empiris bahwa kebutuhan untuk merekonstruksi tafsir sebagai basis pendidikan karakter bukanlah gagasan yang mengada-ada, melainkan telah mendapatkan pengakuan formal dalam dunia akademik, meski secara spesifik belum banyak yang menaunkannya langsung dengan kerangka hurriyah dan istiqlal sebagaimana diusulkan penelitian ini.

Dari sisi ayat, QS. Ar-Ra'd [13]: 11 kembali relevan untuk dibahas dalam konteks rekonstruksi ini. Sebagaimana telah disinggung, penafsiran kontemporer menekankan bahwa perubahan nasib suatu kaum berawal dari perubahan yang terjadi pada diri masing-masing individu (Rahman & Erdiyansyah, 2024). Prinsip ini bila ditarik ke ranah pendidikan karakter memberi pesan yang sangat kuat: kemerdekaan sebuah bangsa dari keterpurukan moral, korupsi, atau dekadensi karakter, tidak akan pernah terwujud tanpa dimulai dari transformasi karakter setiap individu warganya, dan pendidikan adalah instrumen utama untuk memulai transformasi tersebut.

Rekonstruksi makna kemerdekaan ini juga menemukan pijakannya dalam kajian komprehensif tentang nilai-nilai karakter dalam Al-Qur'an dan hadis, yang mengidentifikasi bahwa pendidikan karakter perspektif Islam mencakup relasi manusia dengan Tuhan, dengan dirinya sendiri, dengan sesama manusia, dan dengan lingkungan serta kebangsaannya (Chaniago, 2022). Kerangka multidimensi ini sejalan dengan struktur hurriyah-istiqlal yang diusulkan penelitian ini, di mana hurriyah lebih menyentuh relasi manusia dengan Tuhan dan dirinya sendiri, sementara istiqlal lebih menyentuh relasi manusia dengan sesama dan kebangsaannya.

Dengan merangkai seluruh temuan tersebut, penelitian ini merumuskan proposisi rekonstruktif sebagai berikut: kemerdekaan bangsa Indonesia hendaknya tidak lagi dimaknai secara tunggal sebagai peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945, melainkan sebagai proyek pendidikan karakter yang berkesinambungan, di mana setiap generasi dituntut untuk terus-menerus memerdekakan dirinya dari belenggu moral internal (dimensi hurriyah) sekaligus menjaga dan memperkuat kemandirian kolektif bangsanya (dimensi istiqlal). Proposisi inilah yang akan diuraikan lebih lanjut ke dalam nilai-nilai karakter konkret pada pembahasan berikutnya.

Nilai-Nilai Karakter Bangsa yang Bersumber dari Hurriyah dan Istiqlal

Setelah merumuskan proposisi rekonstruktif pada bahasan diatas, maka langkah berikutnya adalah menerjemahkan proposisi tersebut ke dalam nilai-nilai karakter yang konkret dan operasional. Kerangka kebijakan pendidikan karakter di Indonesia sendiri telah merumuskan lima nilai utama Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), yaitu religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas, yang seluruhnya bersumber dari nilai-nilai Pancasila (Peraturan Presiden Republik Indonesia, 2017). Menariknya, kelima nilai utama ini dapat dipetakan secara koheren ke dalam kerangka hurriyah dan istiqlal yang telah dibangun dalam penelitian ini, sehingga terlihat adanya keselarasan mendalam antara wacana tafsir klasik dan kebijakan pendidikan nasional kontemporer.

Nilai religius dan integritas, misalnya, dapat dipahami sebagai turunan langsung dari prinsip hurriyah, yakni kebebasan batin yang bertanggung jawab kepada Tuhan sebagaimana ditegaskan dalam penafsiran Hamka tentang kehendak bebas manusia (Hanif, 2023). Seseorang yang religius dan berintegritas pada dasarnya adalah pribadi yang telah mencapai kemerdekaan batin, karena ia tidak lagi diperbudak oleh godaan untuk berbohong, menipu, atau melanggar prinsip demi keuntungan sesaat. Kejujuran, dalam pengertian ini, adalah salah satu wujud paling nyata dari manusia yang telah benar-benar merdeka dari perbudakan hawa nafsunya sendiri.

Sementara itu, nilai nasionalis dan gotong royong dapat dipahami sebagai turunan dari prinsip istiqlal, yakni kesadaran akan kemandirian dan kedaulatan kolektif yang hanya bisa dicapai melalui kerja sama dan penghormatan terhadap sesama warga bangsa. Prinsip kesetaraan martabat manusia yang ditegaskan dalam penafsiran atas QS. Al-Hujurat [49]: 13 dan larangan merendahkan sesama dalam QS. Al-Hujurat [49]: 11 menjadi fondasi teologis bagi nilai gotong royong ini (Kurniawan & Pulungan, 2026; Bakri & Faza, 2025), sebab kerja sama kolektif hanya mungkin terjalin erat apabila setiap warga saling menghormati martabat satu sama lain, bukan saling merendahkan atau mencemooh.

Nilai kemandirian, yang menjadi salah satu dari lima nilai utama PPK, dapat dilihat sebagai titik temu langsung antara hurriyah dan istiqlal: pada level individu ia berarti kemampuan mengurus diri sendiri tanpa tekanan sebagaimana makna dasar al-hurr (Ibn 'Ashur, 2006), sementara pada level kolektif ia berarti kemampuan bangsa untuk berdiri sendiri sebagaimana makna dasar istiqlal itu sendiri (Umar, 2021). Implementasi pendidikan karakter di sekolah, sebagaimana ditunjukkan oleh data pertumbuhan program PPK yang meningkat pesat dari ratusan sekolah percontohan pada 2016 hingga mencakup seluruh sekolah pada 2019, menunjukkan bahwa negara telah menyadari urgensi menanamkan kemandirian ini sejak dini (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2018).

Kerangka teori pendidikan karakter dari Lickona turut memperkuat sintesis ini, di mana pendidikan karakter dipahami sebagai usaha sadar untuk membantu seseorang memahami, merasakan, dan melakukan nilai-nilai etika inti, yang melibatkan tiga aspek sekaligus: pengetahuan, perasaan, dan tindakan (Lickona, 2016). Ketiga aspek ini sesungguhnya sejalan dengan cara Al-Qur'an membingkai hurriyah dan istiqlal, yang tidak cukup dipahami secara

kognitif semata, melainkan harus dihayati secara afektif dan diwujudkan secara konatif dalam perilaku nyata sehari-hari, baik dalam skala individu maupun kolektif kebangsaan.

Sintesis nilai-nilai karakter ini menegaskan bahwa rekonstruksi makna kemerdekaan melalui hurriyah dan istiqlal bukanlah wacana yang berjarak dari kebijakan pendidikan nasional, melainkan justru dapat memperkaya landasan filosofis-teologis dari kebijakan tersebut. Nilai-nilai PPK yang selama ini dirumuskan terutama dari perspektif Pancasila dapat diperkuat dan diperdalam maknanya ketika ditelusuri akar teologisnya dalam tafsir Nusantara, sehingga pendidikan karakter di Indonesia tidak hanya berpijak pada dasar filosofis kebangsaan semata, tetapi juga berakar kuat pada tradisi keagamaan yang telah lama hidup dan berkembang di bumi Nusantara.

Internalisasi Hurriyah-Istiqlal sebagai Basis Pendidikan Karakter di Indonesia

Bagian terakhir dari analisis ini mengarah pada pertanyaan praktis: bagaimana kerangka hurriyah-istiqlal yang telah direkonstruksi dari tafsir Nusantara dapat diinternalisasikan secara pedagogis dalam sistem pendidikan Indonesia? Pertanyaan ini penting untuk dijawab agar penelitian ini tidak berhenti pada tataran wacana akademik, melainkan memberikan kontribusi nyata bagi perbaikan praktik pendidikan karakter di lapangan, sejalan dengan semangat penelitian kepastakaan yang tetap berorientasi pada kegunaan praktis, bukan sekadar kajian teoretis yang berjarak dari realitas (Zed, 2008).

Langkah pertama yang dapat ditempuh adalah mengintegrasikan pembahasan hurriyah dan istiqlal ke dalam mata kuliah atau mata pelajaran yang relevan, seperti Tafsir Tarbawi di perguruan tinggi keagamaan Islam maupun Pendidikan Agama Islam di jenjang sekolah umum. Preseden yang sudah ada, seperti pemanfaatan buku Tafsir Tarbawi bertema pendidikan karakter sebagai rujukan utama perkuliahan, menunjukkan bahwa integrasi semacam ini secara teknis sangat memungkinkan dan telah terbukti dapat diterima secara akademik (Maya et al., 2024). Kerangka hurriyah-istiqlal dapat memperkaya buku-buku semacam ini dengan menambahkan dimensi kebangsaan yang lebih eksplisit dan kontekstual.

Langkah kedua adalah merancang metode pembelajaran yang tidak berhenti pada transfer pengetahuan kognitif tentang makna hurriyah dan istiqlal, melainkan menyentuh dimensi afektif dan konatif peserta didik, sejalan dengan model tiga aspek pendidikan karakter yang ditekankan Lickona (2016). Misalnya, peserta didik dapat diajak merefleksikan pengalaman pribadinya dalam menghadapi godaan untuk berbuat tidak jujur (dimensi hurriyah), sekaligus diajak berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong nyata di lingkungan sekolah atau masyarakat (dimensi istiqlal), sehingga nilai-nilai tersebut tidak berhenti sebagai hafalan tetapi menjadi pengalaman hidup yang membekas.

Langkah ketiga adalah memperkuat peran keteladanan guru dan tokoh masyarakat sebagaimana dicontohkan oleh sosok-sosok mufasir Nusantara yang menyatukan kesalehan personal dengan kepedulian kebangsaan. Sosok Hamka yang berperan sekaligus sebagai ulama, mufasir, dan pejuang kemerdekaan (Faozi, 2021) dapat dijadikan salah satu figur teladan dalam materi ajar pendidikan karakter, memberi contoh konkret bahwa kesalehan pribadi dan kecintaan pada bangsa bukanlah dua hal yang harus dipertentangkan, melainkan dapat menyatu dalam satu kepribadian yang utuh.

Langkah keempat menyangkut penguatan kebijakan pada level makro, di mana kerangka konseptual hurriyah-istiqlal dapat menjadi salah satu rujukan tambahan dalam pengembangan kurikulum Penguatan Pendidikan Karakter yang telah diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017. Given bahwa data implementasi PPK menunjukkan cakupan yang sudah menyeluruh secara kuantitatif di seluruh sekolah Indonesia (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2018), tantangan berikutnya bukan lagi soal cakupan, melainkan soal

kedalaman dan keautentikan akar nilai yang ditanamkan, sebuah celah yang dapat diisi oleh kerangka teologis-hermeneutis dari tafsir Nusantara.

Sebagai penutup analisis, penelitian ini menegaskan bahwa internalisasi hurriyah dan istiqlal sebagai basis pendidikan karakter bukanlah proyek yang berdiri sendiri dan lepas dari akar tradisi bangsa, melainkan justru upaya pulang kembali kepada mata air keislaman yang telah lama menghidupi perjalanan kemerdekaan Indonesia sejak masa pergerakan hingga kini. Pendidikan karakter yang berakar pada hurriyah akan melahirkan pribadi-pribadi yang jujur dan bertanggung jawab karena kesadaran teologis, bukan sekadar kepatuhan pada aturan, sementara pendidikan karakter yang berakar pada istiqlal akan melahirkan warga bangsa yang mandiri dan bergotong royong karena kesadaran akan martabat bersama, bukan sekadar formalitas kewarganegaraan. Perpaduan keduanya itulah yang, menurut hemat penelitian ini, layak disebut sebagai kemerdekaan yang seutuhnya.

Kesimpulan

Penelusuran panjang atas konsep hurriyah dan istiqlal dalam tafsir Nusantara yang telah diuraikan pada bagian-bagian sebelumnya bermuara pada satu benang merah yang tegas: kemerdekaan dalam nalar keislaman Nusantara tidak pernah berhenti sebagai peristiwa politik yang selesai pada satu titik sejarah, melainkan hidup sebagai dua denyut yang saling bersahutan dalam diri bangsa ini. Denyut pertama adalah hurriyah, kemerdekaan yang bersemayam di ruang batin manusia (kebebasan berkehendak yang senantiasa dipagari tanggung jawab, kebebasan meyakini yang dijaga dari paksaan sekaligus dari relativisme tanpa batas, dan kebebasan berpikir yang tidak pernah lepas dari kesadaran akan pertanggungjawaban di hadapan Tuhan). Denyut kedua adalah istiqlal, kemerdekaan yang bersemayam di ruang kolektif bangsa (kemandirian yang lahir dari kesungguhan mengubah diri sendiri, martabat yang diakui setara tanpa memandang suku maupun golongan, dan kedaulatan yang hanya tegak di atas fondasi saling menghormati). Tafsir Nusantara, sebagaimana ditunjukkan oleh corak pemikiran Hamka, Quraish Shihab, 'Abd Al-Ra'uf Singkel hingga Bakri Syahid, telah merajut kedua denyut ini menjadi satu irama yang utuh, bukan dua wacana yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga kekhasan lokalitasnya justru menjadi kekuatan, bukan kelemahan, dalam mewariskan pesan kemerdekaan lintas generasi.

Dari benang merah tersebut, penelitian ini menegaskan bahwa rekonstruksi makna kemerdekaan menuju basis pendidikan karakter bangsa bukanlah proyek yang mengada-ada, melainkan langkah pulang kembali kepada sumber yang sesungguhnya telah lama tersedia namun belum sepenuhnya digali secara sistematis. Nilai-nilai utama Penguatan Pendidikan Karakter yang dirumuskan negara (religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas) terbukti dapat ditelusuri akar teologisnya secara koheren dalam kerangka hurriyah dan istiqlal, sehingga pendidikan karakter di Indonesia memiliki peluang untuk berpijak lebih dalam, tidak sekadar pada dasar filosofis kebangsaan, tetapi juga pada mata air keislaman yang telah lama menghidupi jiwa bangsa ini sejak masa pergerakan hingga era kemerdekaan. Dengan demikian, kemerdekaan yang seutuhnya, sebagaimana diusulkan penelitian ini, adalah pertemuan antara jiwa yang telah selesai membebaskan dirinya dari perbudakan hawa nafsu dan bangsa yang telah sungguh-sungguh berdiri di atas kaki kemandiriannya sendiri, dan pendidikan karakter adalah jembatan yang paling mungkin menghubungkan keduanya secara berkesinambungan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Saran

Bertolak dari simpulan tersebut, penelitian ini mengajukan beberapa catatan lanjut yang kiranya bermanfaat bagi tiga kalangan sekaligus. Bagi para pengembang kurikulum dan penyusun bahan ajar Pendidikan Agama Islam maupun Tafsir Tarbawi, kerangka hurriyah-istiqlal ini kiranya

dapat dipertimbangkan sebagai salah satu pisau analisis tambahan untuk memperkaya materi ajar pendidikan karakter yang sudah ada, sehingga peserta didik tidak hanya mengenal nilai-nilai karakter sebagai daftar normatif belaka, melainkan memahami akar teologisnya secara utuh dari khazanah tafsir bangsanya sendiri. Bagi kalangan peneliti berikutnya, masih terbuka ruang yang luas untuk memperdalam tema ini melalui pendekatan yang lebih beragam, misalnya penelitian lapangan untuk mengukur sejauh mana internalisasi nilai hurriyah-istiqlal benar-benar termanifestasi dalam perilaku peserta didik, ataupun kajian komparatif yang menyandingkan tafsir Nusantara dengan tafsir kawasan lain di dunia Islam guna memperkaya perspektif kebangsaan yang lebih luas; penulis juga menyarankan agar penelitian lanjutan mulai menyertakan lebih banyak rujukan berbahasa Inggris dari basis data internasional supaya wacana ini semakin dikenal dan diuji di forum akademik global. Adapun bagi pengambil kebijakan pendidikan nasional, hasil penelitian ini kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan bahwa penguatan pendidikan karakter tidak cukup diukur dari seberapa luas cakupan implementasinya di seluruh satuan pendidikan, tetapi juga perlu ditakar dari seberapa dalam akar nilai yang ditanamkan, dan tafsir Nusantara adalah salah satu akar yang sudah sepatutnya mendapat tempat lebih terhormat dalam perbincangan besar tentang masa depan karakter bangsa.

References

- Al-Farmawi, A. H. (1977). *Al-Bidayah fi al-tafsir al-mawdu'i: Dirasah manhajiyah mawdu'iyah*. Maktabah al-Jumhuriyyah.
- Bakri, K., & Faza, A. M. D. (2025). Studi tafsir ayat martabat manusia dalam QS. Al-Hujurat: 11, upaya preventif tindakan bullying. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 15(2), 531–556. https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/agama_islam/article/view/3086
- Chaniago, A. F. (2022). Pendidikan karakter prespektif Al-Quran hadits Nabi Muhammad SAW. *Jurnal Pendidikan Dasar Islam*, 3(1), 79–109. <https://doi.org/10.52166/mida.v3i1.827>
- Faozi. (2021). Negarawan sejati menurut pandangan Hamka dalam Tafsir Al-Azhar. *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*. <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/al-fikra/article/view/12521>
- Gusmian, I. (2015). Tafsir Al-Qur'an di Indonesia: Sejarah dan dinamika. *Nun: Jurnal Studi Alquran dan Tafsir di Nusantara*, 1(1), 1–32.
- Hanif, U. (2023). *Free will dalam Tafsir Al-Azhar: Analisis interpretasi Buya Hamka dan kebebasan berekspresi di era digital*. Mashahif: Journal of Qur'an and Hadits Studies. <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mashahif/article/view/5728>
- Ibn 'Ashur, M. al-T. (2006). *Treatise on Maqasid al-Shari'ah* (M. El-Mesawi, Trans.). International Institute of Islamic Thought.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2018). *Infografis Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK)*. Kemdikbud.
- Kurniawan, S., & Pulungan, J. J. (2026). Martabat kemanusiaan dalam Al-Qur'an menurut Tafsir Al-Azhar karya Prof. Hamka. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 16(1), 25–48. https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/agama_islam/article/view/3125
- Kuswanto, K., & Alfi, I. (2023). Kebebasan beragama menurut tafsir Al-Misbah Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 256. *Al-Idaroh: Media Pemikiran Manajemen Dakwah*, 2(2), 65–71.
- Krippendorff, K. (2018). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). Sage Publications.

- Lickona, T. (2016). *Mendidik untuk membentuk karakter: Bagaimana sekolah dapat mengajarkan sikap hormat dan tanggung jawab* (J. A. Wamaungo, Trans.). Bumi Aksara.
- Lukman, F. (2021). Telaah historiografi tafsir Indonesia: Analisis makna konseptual terminologi tafsir Nusantara. *Shūhuf*, 14(1), 49–77. <https://doi.org/10.22548/shf.v14i1.616>
- Maarif, N. H. (2021). Penafsiran politik Kolonel Bakri Syahid dalam Al-Huda: Tafsir Qur'an Basa Jawi. *Islam Nusantara: Journal for the Study of Islamic History and Culture*, 2(2), 69–91. <https://doi.org/10.47776/islamnusantara.v3i1.64>
- Maya, R., Herman, H., Aisyah, A., & Alfarisi, M. F. (2024). Implementasi buku Tafsir Tarbawi: Tafsir tematik pendidikan karakter karya Fakhrudin Nursyam sebagai referensi pada mata kuliah Tafsir Tarbawi. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(001). <https://doi.org/10.30868/ei.v12i001.5371>
- Mawangir, M. (2018). Nilai-nilai pendidikan karakter perspektif Tafsir Al-Mishbah karya Muhammad Quraish Shihab. *Tadrib: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 4(1), 163–182. <https://doi.org/10.19109/tadrib.v4i1.1917>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Rahman, M. I., & Erdiyansyah. (2024). Pesan dakwah dalam Q.S. Ar-Ra'd [13]: 11 ditinjau dari penafsiran klasik-kontemporer. *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman*, 10(2). <https://doi.org/10.24952/tazkir.v10i2.11045>
- Saifuddin, & Wardani. (2017). *Tafsir Nusantara: Analisis isu-isu gender dalam Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab dan Tarjuman al-Mustafid karya 'Abd al-Ra'uf Singkel*. LKiS.
- Umar, N. (2021, Mei 5). Memaknai kebebasan (Al-Hurriyah). *Media Indonesia*. <https://mediaindonesia.com/renungan-ramadan/403037/memaknai-kebebasan-al-hurriyah>
- Zaiyadi, A. (2018). Lokalitas tafsir Nusantara: Dinamika studi al-Qur'an di Indonesia. *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist*, 1(1), 1–26. <https://doi.org/10.35132/albayan.v1i1.1>
- Zed, M. (2008). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.